

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Fenomena korupsi yang terjadi di sektor publik, tidak hanya berskala kecil, tetapi juga terjadi di dalam manajemen publik tingkat operasional hingga yang dilakukan oleh para pejabat. Salah satu upaya untuk mencegah korupsi adalah reformasi birokrasi, yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui pembangunan zona integritas.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu implementasi pembangunan zona integritas dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, serta kendala dalam implementasi pembangunan zona integritas dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan solusinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini adalah : (1) implementasi pembangunan zona integritas dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dilakukan dengan : (a) menempatkan seluruh layanan menjadi di 1 (satu) ruang layanan yang dinamakan “Layanan Bersama Satu Pintu Hukum dan HAM”, (b) membangun aplikasi berbasis teknologi informasi/ *web-site* (SILANDU), pelayanan bersama satu pintu, dan layanan informasi dan peng-aduan dalam satu nomor layanan, (c) perubahan pola pikir dan kerja pegawai dengan kegiatan kerohanian, (d) menyediakan kanal layanan pengaduan, dan (e) rutin tiap bulan mengumumkan hasil survey kepuasan masyarakat; (2) kendala dalam implementasi pembangunan zona integritas dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, antara lain : (a) belum adanya *role model*, (b) belum semua pegawai memiliki komitmen yang sama, (c) pegawai masih berketat pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada pada masing-masing bagian, (d) agen perubahan tidak berjalan efektif, (e) masih ada ego sektoral masing-masing, dan (f) masyarakat masih gagap teknologi dalam menggunakan SILANDU. Adapun solusi dalam menangani kendala tersebut adalah : (a) pimpinan harus menjadi *role model*, (b) semua pegawai memiliki komitmen yang sama dalam implementasi pembangunan zona integritas, (c) perlu dilakukan internalisasi lebih mendalam bagi para pegawai untuk memahami arti pentingnya pembangunan zona integritas, dan (d) terus-menerus dilakukan publikasi penggunaan SILANDU dan menu SILANDU dibuat secara *user friendly* berikut dengan kanal informasi maupun konsultasi.

Kata Kunci : Korupsi, Pembangunan, Pencegahan, Tindak Pidana, Zona Integritas

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime. The phenomenon of corruption that occurs in the public sector is not only on a small scale, but also occurs in the operational level of public management, to those carried out by officials. One of the efforts to prevent corruption is bureaucratic reform, which is carried out by every government agency, including the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Central Java through the construction of an integrity zone.

Based on the above background, the authors formulate several problems, namely the implementation of the development of an integrity zone in the context of preventing corruption in the Central Java Ministry of Law and Human Rights Regional Office, as well as obstacles in the implementation of the integrity zone development in the context of preventing corruption within the Central Java Ministry of Law and Human Rights Regional Office and the solution. The research method used is a sociological juridical approach, with a descriptive analytical research specification. The data used in this study are primary data and secondary data, obtained through interviews and literature study, then analyzed qualitatively using law enforcement theory and law effectiveness theory.

The results of this study are : (1) the implementation of the development of an integrity zone in the context of preventing corruption within the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java, carried out by : (a) placing all services in 1 (one) service room called “One Stop Service for Law and Human Rights”, (b) building information technology/website-based applications (SILANDU), one-stop shared services, and information and complaints services in one service number, (c) changing the mindset and work of employees with spiritual activities, (d) providing complaint service channels, and (e) regularly announcing the results of community satisfaction surveys; (2) obstacles in the implementation of the integrity zone development, in the context of preventing corruption within the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Central Java, include : (a) the absence of a role model, (b) not all employees have the same commitment, (c) employees are still struggling with the implementation the duties and functions that exist in each section, (d) agents of change do not work effectively, (e) there are still individual sectoral egos, and (f) people are still technologically stumped in using SILANDU. The solutions in dealing with these obstacles are: (a) the leadership must be a role model, (b) all employees have the same commitment in the implementation of the integrity zone development, (c) it is necessary to carry out deeper internalization for employees to understand the importance of the integrity zone development, and (d) the use of SILANDU is continuously published, and the SILANDU menu is made user-friendly along with information and consultation channels.

Keywords : Corruption, Crime, Development, Integrity Zone, Prevention